

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT

### PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya(A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh :

**RAHMAT ARIF MAULANA**

**02270610888**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : Rahmat Arif Maulana  
 NIM : 02270610888  
 PRODI : D-III Administrasi Perpajakan  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 JUDUL : Efektivitas Pembayaran Pajak Air Permukaan di UPT  
 Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

Pekanbaru, 08 Juli 2025

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat

NIP: 19880718 202012 2 018

MENGETAHUI

Plt. DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Desriyuliftah, S.E., M.M., Ak

NIP: 19740412 200604 2 002

KETUA PRODI

D-III Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afriza, S.HI.M.A

NIP: 19790911 201101 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Steelslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Rahmat Arif Maulana  
 NIM : 02270610888  
 PROGRAM STUDI : D3 Administrasi Perpajakan  
 FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 SEMESTER : VI  
 JUDUL : Efektivitas Pembayaran Pajak Air Permukaan Di Upt  
 Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  
 TANGGAL UJIAN : 16 Juni 2025

### TIM PENGUJI

#### Ketua

**Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

#### Sekretaris

**Pivit Septiary Chandra, M. Si**  
**NIP. 19920925 201903 2 021**

#### Penguji I

**Dr. Muhammad April, S.H, M.HUM**  
**NIP. 19860405 202321 1 018**

#### Penguji II

**Zulhaida, S.E, MM**  
**NIP. 19741204 201411 2 001**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmat Arif Maulana  
 Nim : 02270610888  
 Tempat/ Tgl Lahir : Langkat, 07 Agustus 2009.  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Program Studi : D-III Administrasi Perpajakan  
 Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pembayaran Pajak Air Permukaan  
 di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Yang membuat pernyataan  
 Mahasiswa



Rahmat Arif Maulana

Nim. 02270610888

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

# EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

OLEH

**RAHMAT ARIF MAULANA**  
**NIM.02270610888**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang tahun 2021–2024 serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pajak tergolong sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak air permukaan ialah adanya peraturan daerah Provinsi Riau, komunikasi yang intensif antara pihak UPT dan wajib pajak, serta inovasi dalam metode pembayaran. Faktor-faktor tersebut mendorong kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses administrasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.

***Kata Kunci : Efektifitas, Pajak Air Permukaan***



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### *Effectiveness of Surface Water Tax Payment at the UPT of The Bangkinang Revenue Management*

**RAHMAT ARIF MAULANA**  
**NIM.02270610888**

*This research aims to determine the effectiveness level of surface water tax payments at the Bangkinang Revenue Management Unit (UPT) from 2021 to 2024, as well as the factors influencing taxpayer compliance. This study employs a descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that tax payments are classified as highly effective. Factors influencing compliance with surface water tax payments include the existence of regional regulations issued by Riau Province, intensive communication between the UPT and taxpayers, and innovations in payment methods. These factors promote taxpayer compliance and simplify administrative processes, thereby contributing to increased regional revenue through the optimization of surface water tax collection at the Bangkinang Revenue Management Unit.*

**Keywords : Effectiveness, Surface Water Tax**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir berjudul **“EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG”** dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, serta mengajarkan nilai-nilai kemajuan dan kedamaian yang terus hidup dalam diri umat-Nya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat kepada yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda saya Heri Efendi dan Ibunda saya Zulfiani, kakak saya Nuryuli Aulia serta adik saya Nurul Fadhilla yang saya sayangi atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk penulis. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos. ,M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Juliana, Se, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I., M.A. selaku Kepala Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Muslim, Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat selaku Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing yang membantu dalam meluangkan waktu, memberikan arahan dan membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Bapak/Ibu staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya untuk Dosen Program D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
8. Untuk teman-teman seperjuangan saya D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2022, terimakasih atas suka duka serta bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir. Meski demikian, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini, Sehingga penulis sangat membutuhkan saran dan kritik positif dari pembaca. Agar Hasil Tugas Akhir yang didapat





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai Kesempurnaan dan bisa menjadi Referensi Yang Baik Bagi Pembaca.

Penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan kepada penulis ketika berkuliah akan dibalas Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan dimudahkan segala urusan, *Aamiin yarobbal'alamin*.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

**Rahmat Arif Maulana**  
**Nim. 02270610888**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	10
1.5.2 Waktu Penelitian .....	11
1.5.3 Jenis Data .....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	11
1.5.6 Analisis Data .....	12
1.6 Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>14</b>
2.1 Sejarah Singkat Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang ..	14
2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....	16
2.3 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....	16
2.4 Uraian Tugas Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....	18
2.5 Aktifitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang ...	21
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	<b>24</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	24

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.1.1 Pengertian Pajak.....	24
3.1.2 Fungsi Pajak .....	25
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	26
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	27
3.1.5 Jenis-Jenis Pajak .....	27
3.1.6 Pengertian Efektivitas .....	29
3.1.7 Pajak Air Permukaan.....	29
3.1.8 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan .....	30
3.1.9 Subjek Pajak Air Permukaan .....	31
3.1.10 Objek Pajak Air Permukaan.....	31
3.1.11 Bukan Objek Pajak Air Permukaan .....	31
3.1.12 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan .....	31
3.1.13 Tarif Pajak Air Permukaan.....	32
3.1.14 Perhitungan pajak air permukaan.....	33
3.1.15 Pajak Menurut Islam .....	33
3.2 Tinjauan Praktek .....	34
3.2.1 Cara perhitungan untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan wajib pajak.....	34
3.2.2 Pendapatan Pajak Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.....	35
3.2.3 Penerimaan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan pendapatan Bangkinang.....	36
3.2.4 Efektivitas Pajak Air Permukaan Di UPT pengelolaan Pendapatan Bangkinang.....	36
3.2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak air permukaan .....	39
3.2.6 Perbandingan teori dan praktek .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Target Dan Realisasi Pajak air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2021 Sampai Tahun 2023.....	4
<b>Tabel 1.2</b> Daftar Perusahaan Atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di UPT . Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.....	6
<b>Tabel 1.3</b> Target Dan Realisasi Seluruh Pajak Di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2024 .....	7
<b>Tabel 3.1</b> Jumlah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2021-2024 .....	35
<b>Tabel 3.2</b> Pendapatan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....	36
<b>Tabel 3.3</b> Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	38
<b>Tabel 3.4</b> Efektivitas Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2021-2024.....	38
<b>Tabel 3.5</b> Perbandingan Tinjauan Teori dan Praktek .....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang .....	18
<b>Gambar 3.1</b> Perkembangan Data Efektifitas Pajak Air Permukaan 2021-2024 .....	39





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan tidak lepas dari kebijakan ekonomi. Pemerintah Indonesia dituntut untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Negara. Untuk memenuhi kepentingan rakyat pemerintah membutuhkan dana, dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa kekayaan alam maupun dari penerimaan negara. Penerimaan negara sendiri terbagi menjadi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri, dan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan definisi menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 (Mardiasmo, 2023)

Berdasarkan badan yang dilihat pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah di atur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur keuangan daerah, salah satunya melalui penerimaan daerah, yakni pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah sangat berperan penting dalam pembangunan suatu daerah dalam pembangunan suatu daerah yang dikarenakan pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD). PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu Pajak Air Permukaan.

Pajak daerah terbagi atas provinsi dan kabupaten/kota dan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Salah satu penerimaan pajak daerah adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, di mana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

Pajak air permukaan merupakan pajak yang objek pajaknya adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Tidak termasuk dari pengenaan pajak ini adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang undangan. Selain itu juga pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Pajak air permukaan dan jenis pajak daerah lainnya diatur oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda dalam menjalankan tugas pengoperasian pajak daerah harus mempunyai sistem pengendalian internal yang mampu menjaga aktivitas terlaksana dengan benar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pendapatan daerah; merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pengoordinasian pendapatan daerah, menyelenggarakan urusan pajak dan retribusi daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pemungutan pajak air permukaan dilaksanakan pada kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah langsung, yang pemungutannya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bangkinang atau yang lebih dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam proses pengurusan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Peningkatan pendapatan daerah merujuk pada Upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber yang sah. Tujuan utama dari peningkatan pendapatan daerah adalah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah sehingga dapat mendanai Pembangunan dan pelayanan public secara lebih efektif.

**Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2022 Sampai Tahun 2024**

No	Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)
1.	2021	Rp.498.436.188	Rp.4.151.227.822
2.	2022	Rp.2.682.791.908	Rp.2.751.036.940
3.	2023	Rp.3.240.777.939	Rp.3.220.701.937
4.	2024	Rp.3.128.860.954	Rp.4.108.195.716

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2025



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa jumlah target dan realisasi pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan adalah Rp. 498.436.188 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp.4.151.227.822 yang mencapai dari jumlah target yang ditetapkan atau dapat di tunjukkan dengan persentase, pada tahun 2022 target yang ditetapkan adalah Rp.2.682.791.908 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp.2.751.036.940 yang mencapai dari jumlah target yang ditetapkan atau dapat di tunjukkan dengan persentase, pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah Rp.3.240.777.939 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.3.220.701.937 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun belum mencapai dari jumlah target yang ditetapkan atau dapat di tunjukkan dengan persentase, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan target yang ditetapkan sebesar Rp.3.128.860.954 dengan peningkatan realisasi penerimaan yang melebihi target sebesar Rp.4.108.195.716 atau dapat di tunjukkan dengan persentase, Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada pajak air permukaan terjadi peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2024.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu menghimpun sumber dana untuk membiayai kegiatan dan pembangunan di daerah salah satu nya melalui pajak daerah, pajak daerah yang nantinya telah dipungut dikumpulkan kemudian dialokasikan dan didistribusikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan pemungutan dan retribusi daerah, kesalahan masih ditemukan pada kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga membutuhkan partisipasi dan upaya dalam pemungutan pajak.

**Tabel 1.2 Daftar Perusahaan Atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang**

No.	Nama Perusahaan /Wajib Pajak	Alamat Perusahaan	Jenis Olahan
1	PT. Adimulia Agro Lestari	Desa Gunung Mulia Kec. Gunung Sahilan	PKS
2	PT. Arindo Trisejahtera	Desa Petapahan Kec. Tapung	PKS
3	PT. Ciliandra Perkasa	Desa Siabu Kec. Salo	PKS
4	PT. Johan Sentosa	Desa Seijernih Kec. Bangkinang Barat	PKS
5	PT. Multi Agro Sentosa	Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	PKS
6	PT. Padasa Enam Utama	Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu	PKS
7	PT. Pdam Tirta Kampar	Jln. Sudirman Bangkinang	PDAM
8	PT. Rapp (Estate Teso Timur)	Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sahilan	Kebun
9	PT. Riau Kampar Sahabat Sejati	Desa Sukaramai Kec. Tapung	PKS
10	PT. Sewangi Sejati Luhur	Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu	PKS
11	PT. Subur Arum Makmur	Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	PKS
12	PT. Tasma Puja	Desa Kampar Kec. Kampar	PKS
13	PT. Tunggal Yunus Estate	Desa Petapahan Kec. Tapung	PKS
14	PT. Air Kampar	Desa Pulau Birandang Kec. Kampa	PKS
15	PT. Mitra Bumi	Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang	PKS
16	PT. Pln Persero Plta Koto Panjang	Jln. Tanjung Datuk No. 74 Pekanbaru	PLTA

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang memiliki 16 perusahaan yang menjadi wajib pajak air permukaan Yaitu PT. Adimulia Agro Lestari dengan jenis olahan PKS ( Pabrik Kelapa Sawit ), PT. Arindo Trisejahtera dengan jenis olahan PKS, PT. Ciliandra Perkasa dengan jenis olahan PKS, PT. Johan Sentosa dengan jenis olahan PKS, PT. Multi Agro Sentosa dengan jenis olahan PKS, PT. Padasa Enam Utama dengan jenis olahan PKS, PT. Pdam Tirta Kampar dengan jenis olahan PDAM, PT. Rapp (Estate Teso Timur) dengan jenis olahan Kebun, PT. Riau Kampar Sahabat Sejati dengan jenis olahan PKS.

Sedangkan PT. Sewangi Sejati Luhur dengan jenis olahan PKS, PT. Subur Arum Makmur dengan jenis olahan PKS, PT. Tasma Puja dengan jenis olahan



PKS, PT. Tunggal Yunus Estate dengan jenis olahan PKS, PT. Air Kampar dengan jenis olahan PKS, PT. Mitra Bumi dengan jenis olahan PKS, PT. Pln Persero Plta Koto Panjang dengan jenis olahan PLTA.

**Tabel 1.3 Target Dan Realisasi Seluruh Pajak Di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2024**

No.	Jenis Pajak	Target (RP)	Realisasi (RP)	Presentase (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp.52.259.498.170	Rp.48.099.009.334	92,04%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp.24.115.630.198	Rp.24.730.500.273	102,55%
3	Pajak Air Permukaan (PAP)	Rp.3.128.860.954	Rp.4.108.195.716	131,30%

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 diperoleh informasi bahwa jumlah target dan realisasi seluruh pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dari tahun 2024 menunjukkan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) target yang ditetapkan adalah Rp. 52.259.498.170 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 48.099.009.334 yang belum mencapai dari jumlah target yang ditetapkan atau dapat di tunjukkan dengan persentase. Pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) target yang ditetapkan adalah adalah Rp. 24.115.630.198 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 24.730.500.273 mencapai target yang ditetapkan atau dapat ditunjukkan dengan persentase.

Pada Pajak Air Permukaan (PAP) target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.128.860.954 dengan realisasi penerimaan yang melebihi target sebesar Rp. 4.108.195.716 atau dapat ditunjukkan dengan persentase, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi seluruh pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Pajak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan Bermotor (PKB) tidak mencapai target yang ditetapkan, dan dua pajak lainnya yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.

Tinjauan literatur penelitian ini juga dilakukan oleh Waani (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara” mengkaji efektifitas pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2011-2015, dia menyatakan bahwa efektifitas pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan, wajib pajak yang terdaftar melaporkan pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, masih melakukan penundaan pembayaran atas pengenaan kewajiban perpajakan nya tersebut yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh wajib pajak atau di sebabkan beberapa faktor lainnya. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah krisis air dan keterbatasan sumber daya air, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial/ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, perlindungan ekosistem, tekanan internasional kebijakan global, dan kebutuhan akan kebijakan yang efektif/efisien.

Studi kasus difokuskan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang sebagai representasi peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan ini. Bangkinang sebagai pusat ekonomi dan aktivitas industri di Riau,



menawarkan studi yang relevan terkait peningkatan dalam proses pembayaran pajak air permukaan. Pengumpulan data melibatkan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen air, kebijakan pajak yang berlaku, dan tantangan administratif yang mungkin dihadapi oleh UPT.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pembayaran Pajak air Permukaan Di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efektifitas pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas pembayaran pajak air permukaan di UPT Pendapatan Bangkinang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Bagi Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan baik yang bersifat teoretis maupun praktis tentang peningkatan pendapat daerah melalui efektivitas pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.

#### **1.4.2 Bagi Instansi**

Sebagai bahan masukan berupa informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu dalam Pembayaran Pajak Air Permukaan.

#### **1.4.3 Bagi Kampus**

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menambah informasi pembelajaran bagi mahasiswa program studi D3 Administrasi perpajakan selanjutnya mengenai peningkatan pendapatan daerah melalui efektivitas pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Tugas akhir ini mengambil objek penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang yang beralamat di Jl. Letnan Boyak No.74, Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28784.

#### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai selesai.

#### **1.5.3 Jenis Data**

1. Data Primer





Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa observasi. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi melalui hasil penelitian di lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan (Sugiyono, 2008:137).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan data disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain, biasanya sumber berupa data dokumentasi atau berupa arsip-arsip resmi secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2008:137).

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Mayang sari lubis, 2018:31)

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah Suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit (Sudaryono, 2016:82).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, dan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain lain (Sudaryono, 2016:90).

### 1.5.5 Analisis Data

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membagi dalam 4 bab, dan masing-masing bab dibagi dengan sub bab sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi, waktu, jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II: GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang beserta visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi kepegawaian di perusahaan.

#### **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Singkat Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah kantor yang umumnya bergerak dibidang system pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor dari daerah suatau kedaerah lainnya. Dimana setiap masyarakat harus wajib membayar pajak kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya dan selama 5 tahun mereka harus wajib ganti STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).

Samsat adalah kantor bersama 3 instansi. Sederhananya, samsat adalah suatu sistem yang kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Pengurusan surat-surat kendaraan itu dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dari ketiga instansi tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam terbitnya surat-surat kendaraan di Indonesia. Berikut fungsi masing-masing dari ketiga lembaga tersebut:

1. Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab pada lingkup pelunasan PKB atau pajak kendaraan bermotor tahunan atau lima tahunan dan rincian lainnya.
2. PT jasa raharja sebagai pengelola atas pembayaran SWDKLLJ atau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang kamu bayarkan bersamaan dengan PKB.

3. Ditlantas polda atau Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada operasi unit Regident Ranmor atau Unit Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Kantor UPT Pendapatan Bangkinang Bapenda Provinsi Riau pada awalnya dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. KPTs. 29 Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah melalui Perda No.5 Tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di dasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 diubah menjadi Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan amanat PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja Provinsi Riau (SOTK) diantaranya Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantu Bidang Pendapatan serta dapat ditugaskan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang di perintahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

### 2.2.1 Visi

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang ramah, profesional dan inovatif.

### 2.2.2 Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui insentififikasi dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan produktifitas Kerja Pegawai.

## 2.3 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

Pada peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 pasal (4) menyebutkan susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan di Provinsi Riau, salah satunya susunan organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang terdiri atas :

1. Kepala UPT
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan
4. Seksi Penagihan dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

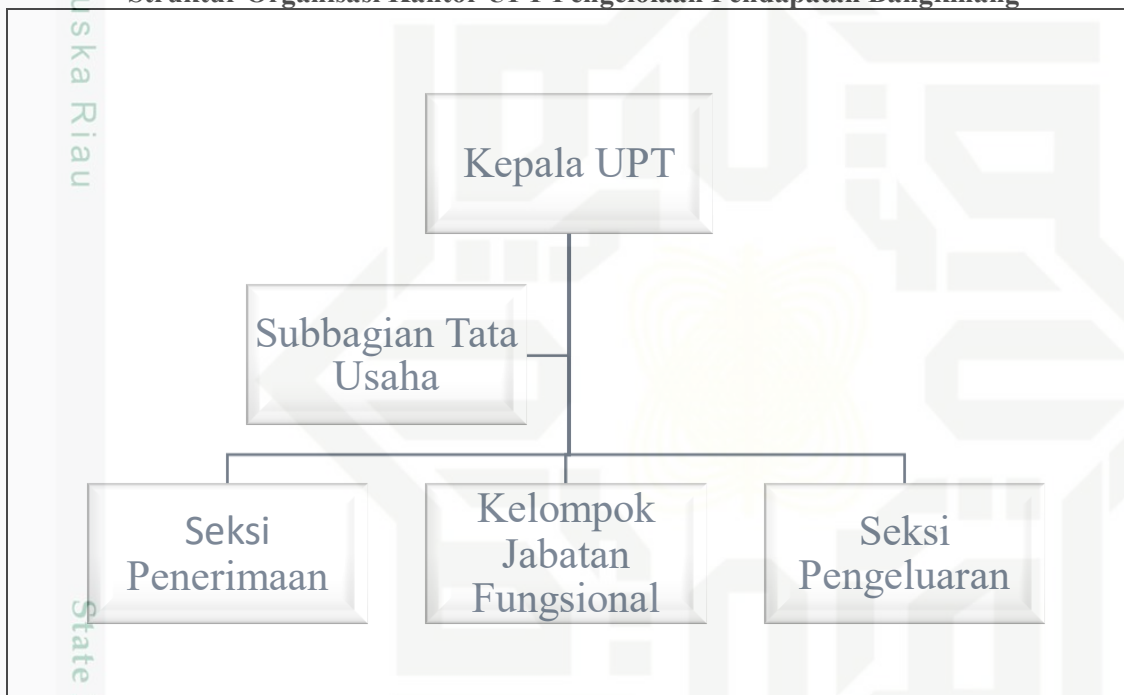
Pada peraturan Gubernur Riau pasal (1) UPT dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar
- b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja kecil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal (2) tersebut juga di jelaskan bahwa UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, kelas A. UPT pengelolaan pendapatan Daerah kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah kelas A di bidang pekerjaan umum.

**Gambar 2. 1**  
**Struktur Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang**



Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2025

#### 2.4 Uraian Tugas Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Bangkinang adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepala UPT

Pimpinan serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua bagian atau bidang memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama dan efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

- a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Penelolan Pendapatan Bangkinang.
- b. Menyelenggarakan koordinasi memimpin pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi Daerah.
- d. Menyelenggarakan kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dan retribusi daerah.
- e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional.
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait.
- g. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 2. Subbagian Tata Usaha

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dan Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi Daerah.
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan.
- g. Melaksanakan pengelolaan tata usaha naskah dinas dan kearsipan.
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Penelolan Pendapatan Bangkinang dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
- k. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 3. Seksi Penerimaan

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi penerimaan.
- c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
- d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
- e. Melakukan pengadaa dan pengembangan pendapatan.
- f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
- g. Melakukan pemantauan, evaulasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4. Seksi Penagihan

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan.
- c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
- d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
- e. Melakukan penggandaan dan pengembangan pendapatan.
- f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang bertugas melaksanakan tugas khusus sesuai keahliannya, dalam bidang pelayanan pajak dan retribusi daerah.

#### 2.5 Aktifitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang

Sebagaimana yang diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan wewenang yang bertujuan menerbitkan dan mengesahkan segala



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

surat-surat yang berhubungan dengan segala jenis kendaraan terutama kendaraan yang merupakan transportasi darat. Adapun jenis tugas lain sebagai aktifitas pelayanan dari struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

##### 1. STNK

Yang akan menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan.

##### 2. Reg STNK

Bagian yang meregistrasi buku kendaraan bermotor.

##### 3. Baur STNK

Ini merupakan bintaran urusan STNK.

##### 4. BPKB

Bagian BPKB ini yang akan menerbitkan atau mengeluarkan buku kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bukti yang sah kepemilikan kendaraan bermotor.

##### 5. Kasat

Merupakan kepala satuan lalu lintas polres Riau. Kasat ini memiliki

##### 6. Putor TNKB

Adalah petugas samsat yang bertanggung jawab tentang pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

##### 7. Baur Cek Fisik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cek fisik kendaraan bermotor merupakan bagian utama penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

#### 8. Baur Mutasi

Merupakan bagian yang sama dengan bagian cek fisik. Kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan merupakan identitas pertama pada kendaraan bermotor yang sudah dikeluarkandari dealer yang memenuhi sehingga baru dapat didaftarkan penerbitan BPKB dan STNK.

#### 9. Pendaftaran

Bagian pendaftaran ini memiliki tugas dan fungsi melakukan atau mengurus masyarakat yang akan melakukan melakukan transaksi awal dengan mengisi suatu formulir yang bertujuan untuk pengenalan diri ke suatu instansi.

#### 10. File

Salah satu bagian yang penting karena bagian ini adalah bagian kearsipan segala macam surat-surat penting yang telah diterbitkan agar tidak hilang.

#### 11. Reg Ranmor

Bagian yang akan meregistrasi buku kendaraan bermotor.

#### 12. Buku Induk

Bagian pencatatan buku kendaraan bermotor.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**13. Perpanjangan**

Bagian yang mengurus apabila masa berlaku kendaraan STNK telah habis dalam jangka waktu lima tahun maka dilakukan pergantian atau perpanjangan STNK.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Efektivitas Pembayaran Pajak Air Permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas pembayaran pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang pada periode 2021 hingga 2024 berada pada kategori sangat efektif. Hal ini ditunjukkan oleh capaian realisasi pajak yang mendekati atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak air permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang yaitu pembayaran pajak air permukaan telah di atur dalam peraturan daerah dan peraturan Gubernur, pihak UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang intens melakukan komunikasi dengan Perusahaan wajib pajak, pembayaran pajak air permukaan sudah melakukan inovasi pembayaran non tunai, dan kesadaran Wajib Pajak Air Permukaan yang tinggi untuk membayar pajak yang terhutang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2

##### Saran

Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran yang telah berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi penulis selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana Efektivitas Pembayaran Pajak Air Permukaan Di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang supaya lebih meningkat pembayaran pajak air permukaan tiap tahunnya.
2. UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang sudah berusaha melakukan berbagai cara untuk menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak air permukaan, akan tetapi sebaiknya UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang mencari cara lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut atau dengan cara mencari inovasi baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 103

Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. malang: UB Press.

Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, 1009–1015.

Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta Pusat: Taushia.

Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Lubis, M. S. (2018). Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Deepublish.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan edisi terbaru. Yogyakarta: Andi Offset

Peraturan Gubernur Riau No 37 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.

Sudaryono. (2016). Metodologi Penelitian. Tangerang: Kencana.

Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang No 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Wani, I. G. K. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 4(1), 667–675.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8890/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

18 Desember 2024

Yth. **Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Rahmat Arif Maulana  
NIM : 02270610888  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI EFEKTIFITAS PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam

Wakil Dekan I.

**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19780101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-9063/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

24 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Jl. Jend.Sudirman No.460 Jadirejo  
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Rahmat Arif Maulana  
NIM. : 02270610888  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Efektifitas Pembayaran Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.  
NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71403  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-9063/Un.04/F.VII/PP.00.9/12.2024** Tanggal **24 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>RAHMAT ARIF MAULANA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>02270610888</b>   |
| 3. Program Studi     | : | <b>D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN</b>  |
| 4. Jenjang           | : | <b>DIII</b>  |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI EFEKTIFITAS PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>KANTOR SAMSAT BANGKINANG</b>  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

### REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2025/20

Tentang

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: **503/DPMP/2025/NON**  
**IZIN-RISET/71338** Tanggal 13 Januari 2025 dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian  
kepada:

1. Nama : **RAHMAT ARIF MAULANA**  
2. NIM : 02270610888  
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU  
4. Program Studi : ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
5. Jenjang : DIII  
6. Alamat : PEKANBARU  
7. Judul Penelitian : **PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI EFEKTIFITAS  
PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT PENGELOLAAN  
PENDAPATAN BANGKINANG**  
8. Lokasi Penelitian : KANTOR SAMSAT BANGKINANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 14 Januari 2025

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Plt. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

  
**GUSTIAN, S.Sos**

Penata/III c

NIP. 19820807 200801 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN**  
**BANGKINANG**

Jl. LETNAN BOYAK NO. 74 BANGKINANG  
 Website : [www.badanpendapatan.riau.go.id](http://www.badanpendapatan.riau.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 970/BAPENDA/UPT.05/131

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Nomor : 071/BKBP/2025/12 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi tanggal 13 Januari 2025, maka UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dengan ini menerangkan nama mahasiswa/i di bawah ini :

Nama	: RAHMAT ARIF MAULANA
NIM /KTP	: 02270610888
Program Studi	: D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Benar telah mengadakan penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang pada tanggal 13 Januari 2025 guna melengkapi data pada penyusunan Tugas Akhir yang berjudul : **"PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI EFEKTIFITAS PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 26 April 2025

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG  
 BAPENDA PROVINSI RIAU,



**ZULFAHMI, S.Pd, MM**  
 Pembina  
 NIP. 19741126 200701 1 005





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Rahmat Arif Maulana**, lahir di Langkat pada tanggal 07 Agustus 2004 Anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Heri Efendi dan Ibunda Zulfiani. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 053958 di Sido Mulyo pada tahun 2010-2016, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MTS LKMD Kasikan pada tahun 2016-2019, lalu melanjutkan ke pendidikan menengah atas di MA Himmatul Ummah pada tahun 2019-2022. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tapung selama 2 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis melakukan penelitian dibulan Januari sampai bulan Maret 2025 di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Bangkinang dan penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Efektivitas Pembayaran Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang”**.